

Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat

DOI

10.58784/mbkk.421

Keywords

audit delay
independent
commissioners
board size
operational complexity
debt ratio
audit opinion

JEL Classification

M41
M42

Received 24 November 2026

Revised 17 January 2026

Accepted 18 January 2026

Published 20 January 2026

Michella Beauty Irfania Rerungan

Corresponding author: michella28rerungan@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Herman Karamoy

Sam Ratulangi University - Indonesia

Steven Josia Tangkuman

Sam Ratulangi University - Indonesia

ABSTRACT

Indonesian State-Owned Enterprises (SOEs) are required to maintain a high level of transparency and accountability, particularly in the timeliness of audited financial reporting. However, audit delay remains a persistent issue among SOEs listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study examines the effects of independent commissioners, board size, operational complexity, debt ratio, and audit opinion on audit delay. Using a quantitative approach, this study analyses 65 firm-year observations from 13 SOEs over the period 2020–2024, employing multiple linear regression analysis. The results indicate that board size has a significant negative effect on audit delay, while operational complexity and debt ratio have significant positive effects. In contrast, independent commissioners and audit opinion do not significantly affect audit delay. These findings suggest that internal managerial capacity and organizational complexity play a more critical role than formal governance structures in determining audit timeliness. This study contributes to the audit timeliness literature by providing empirical evidence from state-owned enterprises in an emerging market context.

©2026 Michella Beauty Irfania Rerungan, Herman Karamoy, Steven Josia Tangkuman



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan global yang signifikan, mulai dari ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga komoditas, hingga perubahan arah kebijakan moneter global, yang menuntut pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk menjaga perekonomian Indonesia dan kepercayaan publik. Namun, di Indonesia sendiri juga telah muncul berbagai berita besar berupa kasus-kasus di perusahaan-perusahaan raksasa yang menurunkan tingkat kepercayaan dan menimbulkan kegelisahan publik, khususnya di kalangan investor. Situasi ini menuntut perusahaan mempertanggungjawabkan keterbukaan informasinya, khususnya bagi perusahaan milik negara atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang peran sentral dalam perekonomian nasional. BUMN yang telah *go public* diawasi oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan juga diawasi oleh investor ritel maupun institusional, sehingga dituntut memenuhi keterbukaan informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 mewajibkan penyampaian laporan keuangan tahunan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan, namun masih banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan, dimana hingga 1 April 2024 terdapat 129 Perusahaan Tercatat dan pada 2 Mei 2023 terdapat 61 Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan, keterlambatan ini secara teknis dikenal sebagai *audit delay*.

Audit delay sendiri diartikan sebagai periode waktu yang dibutuhkan oleh auditor independen untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan perusahaan setelah akhir tahun fiskal. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan laporan keuangan *audited*, maka semakin besar pula ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan volatilitas harga saham. Risiko *audit delay* pada BUMN relatif tinggi mengingat besarnya skala usaha, keberagaman lini bisnis, serta pengaruh langsung kebijakan pemerintah terhadap operasional perusahaan. Pada tahun 2024 terdapat kasus *audit delay* yang dialami Perusahaan BUMN PT Indofarma Tbk (INAF) yang hingga Juni 2024 belum menyerahkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2023. Hal ini menimbulkan spekulasi pasar, dan sorotan dari berbagai regulator, serta diperparah dengan indikasi penyimpangan dan dugaan *fraud* dari hasil pemeriksaan BPK, sehingga kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan auditor perlu memperpanjang waktu audit. Kasus ini menunjukkan bahwa *audit delay* berdampak pada reputasi perusahaan serta mengurangi minat pasar terhadap saham tersebut. Selain itu, kasus ini juga

membuktikan bahwa *audit delay* dapat terjadi karena adanya masalah internal perusahaan, dan dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan. Faktor internal biasanya berkaitan pada penerapan tata kelola perusahaan seperti independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, serta kompleksitas operasi perusahaan. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan hal-hal yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan seperti proporsi utang, dan opini audit.

Teori agensi mengemukakan perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal) dapat mempengaruhi keterbukaan informasi, termasuk ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam konteks ini, keberadaan dewan komisaris independen dan besarnya jumlah dewan direksi berperan sebagai mekanisme pengawasan dan kontrol internal yang dapat mengurangi potensi penyimpangan perilaku manajer. Selain itu, tingkat kompleksitas operasional perusahaan dapat berdampak pada lamanya proses audit karena semakin kompleks struktur perusahaan, semakin tinggi pula waktu dan prosedur audit yang dibutuhkan. Di sisi lain, berdasarkan teori kepatuhan, tekanan dari pihak eksternal seperti kreditur dan auditor, berpotensi mendorong perusahaan untuk menaati ketentuan pelaporan secara tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, teori sinyal menjelaskan bahwa keterlambatan dalam menyampaikan laporan audit dapat diartikan sebagai sinyal negatif oleh investor dan pemangku kepentingan, karena menunjukkan potensi masalah dalam keuangan perusahaan.

Meskipun penelitian terkait *audit delay* telah banyak dilakukan, sebagian besar studi terdahulu berfokus pada perusahaan swasta atau sektor manufaktur, sementara penelitian yang secara spesifik mengkaji *audit delay* pada perusahaan BUMN masih relatif terbatas. Padahal, BUMN memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kepemilikan negara, tujuan ganda antara profitabilitas dan pelayanan publik, serta tingkat intervensi pemerintah yang tinggi. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh struktur dewan dan opini audit terhadap *audit delay* menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian dengan mengkaji faktor-faktor penentu *audit delay* pada perusahaan BUMN di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, kompleksitas operasi, proporsi utang, dan opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami determinan *audit delay* pada konteks perusahaan milik negara.

**Tinjauan
pustaka**

Teori agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara satu orang atau lebih (*principals*) yang melibatkan orang lain (*agents*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini menekankan adanya konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik/pemegang saham (prinsipal) dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada prinsipal. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat dirugikan akibat adanya kondisi asimetri informasi yang memberikan kesempatan kepada manajer bertindak untuk kepentingan diri sendiri dengan melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Auditor melalui laporan keuangan audited menjadi pihak yang dapat menjembatani kepentingan prinsipal.

Teori kepatuhan

Teori kepatuhan menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana suatu individu atau kelompok masyarakat cenderung taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan (Milgram, 1963). Teori kepatuhan mendorong perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Sulistyo, 2010). Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 mewajibkan laporan keuangan tahunan disampaikan dan diumumkan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan, sehingga keterlambatan audit merupakan bentuk ketidakpatuhan, yang sangat relevan bagi BUMN sebagai entitas di bawah pengawasan ketat pemerintah dan publik.

Teori sinyal

Teori sinyal mengemukakan mekanisme transfer informasi kepada pihak lain dengan sasaran menyelesaikan perbedaan informasi (Spence, 1973). Manajer sebagai pihak yang mengetahui informasi lengkap dan akurat mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan wajib memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada para stakeholder. Teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi di dalam suatu pengumuman yang dapat menjadi sinyal serta pertimbangan untuk investor serta pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi (Ulfa dan Primasari, 2017). Ketepatan waktu audit dan pelaporan keuangan merupakan sinyal positif yang mencerminkan kompetensi manajemen dan kinerja perusahaan, sedangkan *audit delay* dipandang sebagai sinyal negatif yang mengindikasikan potensi permasalahan internal.

Audit delay

Audit delay adalah periode waktu antara akhir tahun buku perusahaan dan tanggal penandatanganan opini auditor, karena laporan keuangan hanya dapat dipublikasikan setelah proses audit selesai (Dyer & McHugh, 2005). Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun buku. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat menurunkan relevansi dan keandalan informasi keuangan, khususnya bagi perusahaan yang bergantung pada pasar modal (Syachrudin & Nurlis, 2018).

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Tutup Buku}$$

Dewan komisaris independen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 mengatur bahwa Dewan Komisaris minimal terdiri dari dua orang dengan satu diantaranya merupakan komisaris independen yang tidak terafiliasi, atau jumlahnya minimal 30% dari total komisaris, yang dalam penelitian ini diukur dengan perbandingan jumlah komisaris independen terhadap total anggota Dewan Komisaris.

$$\text{DKI} = \frac{\Sigma \text{ Dewan Komisaris Independen}}{\Sigma \text{ Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Ukuran dewan direksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Dewan Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi suatu perusahaan publik setidaknya terdiri dari dua orang anggota Direksi dengan satu diantaranya merupakan direktur utama atau presiden direktur, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014. Dalam penelitian ini ukuran dewan direksi diukur dengan melihat jumlah seluruh anggota dewan direksi yang dimiliki perusahaan.

$$\text{UDD} = \Sigma \text{ Dewan Direksi}$$

Kompleksitas operasi perusahaan

Kompleksitas operasi perusahaan berkaitan dengan unit-unit dalam perusahaan yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan (Safitri dan Triani, 2021). Perusahaan dengan tingkat kompleksitas operasi yang rumit menunjukkan luasnya kegiatan operasional perusahaan sehingga memerlukan waktu pengauditan yang lebih lama untuk memperoleh dan memverifikasi data yang tersebar pada banyak unit. Dalam penelitian ini tingkat kompleksitas operasi diukur dengan melihat jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan.

$$KOP = \Sigma \text{ Anak Perusahaan} + \text{Cucu Perusahaan}$$

Proporsi utang

Tingginya proporsi hutang berhubungan dengan tingginya risiko yang terjadi karena kesehatan keuangan yang buruk. Proporsi hutang yang tinggi juga berkaitan dengan masalah likuiditas dan kelangsungan usaha (Natalia et al., 2025). Proporsi utang dapat dihitung menggunakan rasio leverage atau rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2019). Proporsi utang yang dimaksud dalam penelitian ini diproksikan dengan debt to asset ratio (DAR) yang memberikan gambaran seberapa besar porsi utang terhadap total aset perusahaan.

$$DAR = \frac{\Sigma \text{ Utang}}{\Sigma \text{ Aset}} \times 100\%$$

Opini audit

Opini audit adalah pernyataan pendapat auditor dari proses audit yang telah dilakukan (Arens et al., 2014). Auditor harus memastikan opini yang diberikan telah didasarkan pada bukti yang cukup dan kompeten serta sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Berdasarkan Standar Audit dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), opini audit terdiri dari opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyampaikan pendapat. Dalam penelitian ini opini audit diukur dengan variabel *dummy*, yaitu perusahaan yang memperoleh unqualified opinion akan diberikan angka 1, dan perusahaan yang memperoleh opini yang lain akan diberikan angka 0.

Pengembangan hipotesis

Dewan komisaris independen dan audit delay

Dewan komisaris independen berperan sebagai pihak pengawas yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen, sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka semakin efektif fungsi pengawasan terhadap manajemen, termasuk dalam memastikan proses audit berjalan tepat waktu. Hal ini diharapkan dapat menekan risiko *audit delay*. Penelitian oleh Tanujaya dan Nuriah (2023), serta Kristianti dan Setianingsih (2022) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian oleh Nouraldeen et al. (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sebaliknya, penelitian oleh Virginia et al. (2023) menyatakan bahwa secara parsial dewan komisaris independen tidak mempengaruhi *audit delay*.

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *audit delay*

Ukuran dewan direksi dan audit delay

Ukuran dewan direksi menggambarkan jumlah anggota yang menjabat dalam struktur pengambilan keputusan tertinggi di perusahaan. Dewan direksi yang berukuran besar dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan internal serta mendorong penyampaian informasi yang lebih transparan kepada auditor. Penelitian oleh Kurnia et al. (2024), menunjukkan bahwa dewan direksi tidak secara signifikan mempengaruhi *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Serly (2021) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap *audit delay*.

H2: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *audit delay*

Kompleksitas operasi dan audit delay

Kompleksitas operasi mencerminkan sejauh mana perusahaan melakukan aktivitas operasional. Semakin kompleks kegiatan perusahaan, maka semakin tinggi pula risiko informasi yang asimetris antara manajemen dan auditor. Hal ini menuntut prosedur audit yang lebih mendalam dan waktu yang lebih lama, sehingga berpotensi meningkatkan *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Isaenia & Nurcahaya (2021) serta Sari & Sujana (2021) menunjukkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Sebaliknya, penelitian oleh Safitri dan Triani (2021) menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara kompleksitas operasi perusahaan dengan *audit delay*. Pada penelitian ini pengaruh kompleksitas operasi terhadap *audit delay* diukur dengan melihat jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan BUMN induk.

H3: Kompleksitas Operasi berpengaruh terhadap *Audit Delay*

Proporsi utang dan audit delay

Proporsi utang mencerminkan sejauh mana perusahaan bergantung pada dana eksternal dari kreditor. Proporsi utang yang tinggi dalam struktur keuangan perusahaan dapat meningkatkan kompleksitas audit karena auditor perlu menilai risiko finansial dengan lebih mendalam. Di sisi lain perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi juga cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk menunjukkan kepatuhan terhadap aturan, termasuk dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akibat adanya tekanan dari kreditor dan regulasi tambahan. Penelitian oleh Tanujaya & Nuriah (2023) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Isnaenia & Nurcahya (2021) serta Himawan & Darsono (2024) menunjukkan bahwa proporsi utang berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sementara itu penelitian oleh Hernugraheni et al. (2022), Astuti et al. (2022), Virginia et al. (2022), dan Rankine et al. (2024) menunjukkan bahwa proporsi utang berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

H4: Proporsi utang berpengaruh terhadap *audit delay*

Opini audit dan audit delay

Opini audit dapat mencerminkan kualitas laporan keuangan dan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Berdasarkan teori kepatuhan, apabila auditor menemukan penyimpangan atau kelemahan kepatuhan, maka akan dilakukan audit yang lebih ekstensif dan menyeluruh, yang berdampak pada waktu penyelesaian audit yang lebih lama. Oleh karena itu, opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berpotensi menimbulkan *audit delay* karena membutuhkan proses verifikasi tambahan dan pembahasan yang lebih panjang antara auditor dan manajemen. Penelitian oleh Sari & Sujana (2021) Safitri dan Triani (2021), Tanujaya dan Nuriah (2023), Rankine et al. (2024) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Isnaenia dan Nurcahya (2021) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

H5: Opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*

Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data numerik yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antar variabel melalui metode statistik. Objek penelitian adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024 (5 tahun). Dari total 35 BUMN yang terdaftar,

dipilih 13 perusahaan sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 65 observasi data berdasarkan periode dan kriteria yang telah ditetapkan. Data-data tersebut diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), serta melalui website resmi dari masing-masing BUMN.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Audit Delay* (Y), sedangkan variabel independen mencakup Dewan Komisaris Independen (X1), Ukuran Dewan Direksi (X2), Kompleksitas Operasi (X3), Proporsi Utang (X4), dan Opini Audit (X5). Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan software SPSS. Model analisis regresi uji regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan distribusi model.

Hasil dan pembahasan

Statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data, seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Variabel berskala rasio, yaitu dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, kompleksitas operasi, proporsi utang, dan *audit delay*, dijelaskan melalui nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Sementara itu, variabel opini audit yang menggunakan skala nominal disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi.

Tabel 1. Distribusi frekuensi opini audit berdasarkan total laporan keuangan

Variabel	Frekuensi	Persentase
WTP Tanpa Paragraf Penjelas	42	64,6%
Selain WTP Tanpa Paragraf Penjelas	23	35,4%
Total	65	100%

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan dalam periode tahun 2020-2024 terdapat 42 laporan keuangan (64,6%) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa paragraf penjelas dari total 65 data observasi laporan keuangan audited dari 13 perusahaan BUMN yang dijadikan sampel, dan terdapat 23 laporan keuangan lainnya (35,4%) memperoleh opini selain WTP tanpa paragraf penjelas.

Tabel 2. Statistik deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	65	0,29	0,70	0,51	0,13
Ukuran Dewan Direksi	65	5,00	12,00	8,01	2,47
Kompleksitas Operasi	65	0,00	44,00	19,06	11,76
Proporsi Utang	65	0,35	1,85	0,79	0,22
Audit Delay	65	20,00	196,00	72,75	39,84
Ln Audit Delay	65	3,00	5,28	4,14	0,56

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat variabel dewan komisaris independen memiliki nilai minimum 0,29 nilai maksimum 0,70, rata-rata 0,5095, dan standar deviasi 0,12949. Variabel ukuran dewan direksi memiliki nilai minimum 5,00 nilai maksimum 12,00, rata-rata 8,0154 dan standar deviasi 2,47167. Variabel kompleksitas operasi memiliki nilai minimum 0,00 nilai maksimum 44,00, rata-rata 19,0615 dan standar deviasi 11,76313. Variabel proporsi utang memiliki nilai minimum 0,35 nilai maksimum 1,85, rata-rata 0,7925 dan standar deviasi 0,22492. Sementara itu, variabel *audit delay* mempunyai rentang nilai yang jauh lebih lebar sehingga menyebabkan ketidakseimbangan rentang data dan mempengaruhi hasil uji normalitas. Oleh karena itu dilakukan transformasi logaritma natural (Ln) terhadap variabel *audit delay*. Setelah ditransformasi nilai minimum *audit delay* dari 20,00 menjadi 3,00 dan nilai maksimumnya dari 196,00 menjadi 5,28 dengan nilai rata-ratanya dari 72,7538 menjadi 4,1389 serta standar deviasi dari 39,83718 menjadi 0,56544. Penurunan standar deviasi ini menandakan bahwa penyebaran data setelah transformasi menjadi lebih terkonsentrasi dan tidak lagi terlalu jauh menyimpang dari rata-ratanya.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil uji normalitas

		Unstandardized Residual	
N		65	
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	0,0000000	
	Std. Deviation	0,30601038	
Most Extreme Differences	Absolute	0,081	
	Positive	0,081	
	Negative	-0,040	
Test Statistic		0,081	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^c	Sig.	0,362	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,350
		Upper Bound	0,374

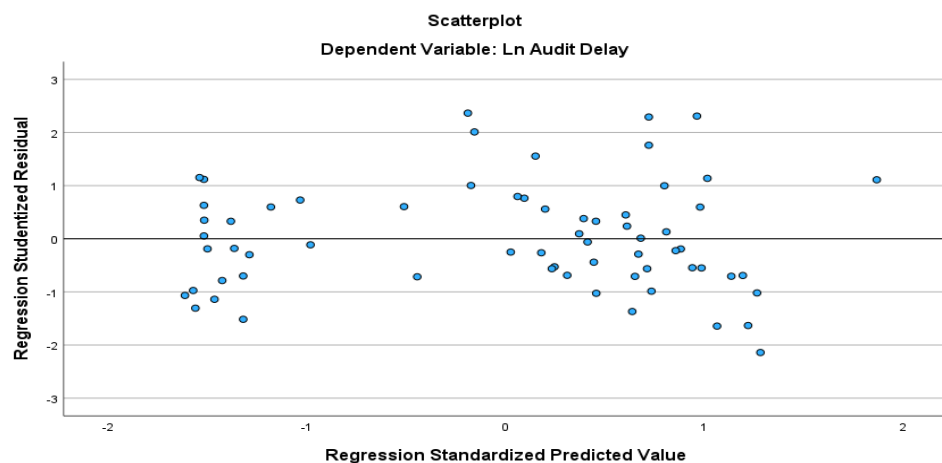
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov test* atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh

sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dewan Komisaris Independen	0,704	1,421
Ukuran Dewan Direksi	0,547	1,829
Kompleksitas Operasi	0,593	1,687
Proporsi Utang	0,464	2,155
Opini Audit	0,489	2,044

Tabel 4 menampilkan hasil uji Multikolinearitas. Untuk nilai *tolerance*, variabel dewan komisaris independen 0,704, ukuran dewan direksi 0,547, kompleksitas operasi 0,593, proporsi utang 0,464, dan opini audit 0,489. Kemudian untuk nilai VIF setiap variabel, dewan komisaris independen 1,421, ukuran dewan direksi 1,829, kompleksitas operasi 1,687, proporsi utang 2,155, dan opini audit 2,044. Hal ini berarti setiap variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen.



Gambar 1. Hasil uji heteroskedastisitas

Berdasarkan uji Heteroskedastisitas dengan metode *scatterplot* pada gambar 1, terlihat bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dimana pada grafik tersebut titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak berkumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Tabel 5. Hasil uji autokorelasi Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,841 ^a	0,707	0,682	0,31871	1,148

Berdasarkan tabel 5, nilai Durbin-Watson yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat gejala autokorelasi dimana $DW < dL$ yaitu $1,148 < 1,7673$. Untuk mengatasi masalah ini, maka dilakukan uji *Cochrane Orcutt* dengan mentransformasikan data ke dalam bentuk LAG. Langkah awal dilakukan dengan membuat variabel lag dari nilai *unstandardized residual* dan kemudian menjalankan regresi antara residual tersebut dengan variabel LAG_RES.

Tabel 6. Hasil Uji Cochrane-Orcutt

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,002	0,035		-0,048	0,962
LAG_RES	0,425	0,115	0,425	3,699	<0,001

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai koefisien LAG_RES sebesar 0,425 yang selanjutnya digunakan dalam rumus transformasi seluruh variabel penelitian, baik independen maupun dependen. Adapun rumus yang digunakan dalam transformasi yaitu $Lag X_i = X_i - (0,425 \times LAG(X_i))$. Rumus yang sama juga diterapkan ke variabel Y dengan mengganti nilai X menjadi nilai Y. Setelah semua variabel berhasil ditransformasikan, uji regresi dilakukan kembali menggunakan untuk mendapatkan nilai Durbin-Watson yang baru.

Tabel 7. Hasil uji autokorelasi Durbin Watson setelah uji Cochrane-Orcutt

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,733 ^a	0,538	0,498	0,28870	1,859

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai durbin-watson yang diperoleh setelah data ditransformasikan telah mengalami peningkatan menjadi 1,859. Nilai ini telah memenuhi syarat uji autokorelasi yaitu $dU < DW < 4-dU$ dimana $1,4378 < 1,859 < 2,5622$. Dengan demikian, data telah memenuhi syarat uji autokorelasi dimana regresi telah bebas dari autokorelasi.

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa model penelitian memiliki nilai Adjusted R² sebesar 0,498, yang menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 49,8% variasi *audit delay*.

Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan kompleksitas operasi dan proporsi utang berpengaruh positif signifikan. Dewan komisaris independen dan opini audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Hasil pengujian hipotesis

Tabel 8. Hasil uji regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,588	0,241		10,762	0,000
Dewan Komisaris Independen	-0,291	0,362	-0,078	-0,805	0,424
Ukuran Dewan Direksi	-0,114	0,025	-0,460	-4,476	0,000
Kompleksitas Operasi	0,016	0,006	0,300	2,824	0,006
Proporsi Utang	0,608	0,286	0,245	2,129	0,038
Opini Audit	-0,159	0,120	-0,147	-1,324	0,191

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 8, didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = 2,588 - 0,291 x_1 - 0,114 x_2 + 0,016x_3 + 0,608 x_4 - 0,159x_5 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut yaitu nilai konstanta sebesar 2,588, koefisien variabel dewan komisaris independen (X_1) sebesar -0,291, koefisien variabel ukuran dewan direksi (X_2) sebesar -0,114, koefisien variabel kompleksitas operasi (X_3) sebesar 0,016, koefisien variabel proporsi utang (X_4) sebesar 0,608, dan koefisien variabel opini audit (X_5) sebesar -0,159.

Tabel 9. Uji koefisien determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,733 ^a	0,538	0,498	0,28870

Berdasarkan tabel 9, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R² adalah 0,498. Maka dapat disimpulkan kemampuan variabel independen dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, kompleksitas operasi, proporsi utang, dan opini audit dalam menerangkan varians variabel dependen *audit delay* yaitu sebesar 49,8%, sementara sisanya sebesar 50,2% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Tabel 10. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,588	0,241		10,762	0,000
Dewan Komisaris Independen	-0,291	0,362	-0,078	-0,805	0,424
Ukuran Dewan Direksi	-0,114	0,025	-0,460	-4,476	0,000
Kompleksitas Operasi	0,016	0,006	0,300	2,824	0,006
Proporsi Utang	0,608	0,286	0,245	2,129	0,038
Opini Audit	-0,159	0,120	-0,147	-1,324	0,191

Penelitian ini menguji lima variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan total data observasi yaitu 65 data. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05 dengan pengujian dua arah (*2-tailed*), sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,001. Berdasarkan tabel 10, variabel dewan komisaris independen nilai t_{hitung} sebesar $-0,805 < 2,001$ dan nilai signifikansi $0,424 > 0,05$, sehingga H_{a1} ditolak dan H_{01} diterima, yang berarti dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Variabel ukuran dewan direksi memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-4,476 > 2,001$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, yang berarti ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *audit delay*. Variabel kompleksitas operasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,824 > 2,001$ dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$, sehingga H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak, yang berarti kompleksitas operasi berpengaruh terhadap *audit delay*. Variabel proporsi utang memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,129 > 2,001$ dan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$, sehingga H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak, yang berarti proporsi utang berpengaruh terhadap *audit delay*. Variabel opini audit memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-1,324 < 2,001$ dan nilai signifikansi $0,191 > 0,05$, sehingga H_{a5} ditolak dan H_{05} diterima, yang berarti opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Pembahasan

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap audit delay

Hasil pengujian menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* yang dibuktikan dengan melihat nilai t_{hitung} sebesar $-0,805$ yang lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,001 dengan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,424. Dengan demikian hipotesis pertama H_{a1} ditolak dan H_{01} diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi dewan komisaris independen berhubungan negatif dengan *audit delay*, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk

mempengaruhi lamanya penyelesaian audit pada perusahaan BUMN. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi karena peran pengawasan komisaris independen belum efektif mendorong percepatan penyelesaian audit, yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh independensi yang cenderung bersifat formalitas serta dominasi pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas yang membatasi ruang gerak komisaris independen dalam memberikan pengawasan yang efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Virginia et al. (2023) yang menemukan proporsi dewan komisaris independen tidak dapat dibuktikan pengaruhnya secara statistik terhadap *audit delay*.

Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap audit delay

Hasil pengujian menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* yang dibuktikan dengan melihat nilai t_{hitung} sebesar -4,476 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,001 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Sehingga hipotesis kedua H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Adapun pengaruh yang diberikan sebesar -0,114 yang berarti bahwa apabila variabel lain dianggap konstan, setiap kenaikan satu satuan ukuran dewan direksi akan menyebabkan penurunan *audit delay* sebesar -0,114. Nilai koefisien negatif menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara ukuran dewan direksi dan *audit delay*. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, kepatuhan, dan sinyal yang menegaskan bahwa dewan direksi yang lebih besar memungkinkan pembagian tugas yang lebih jelas, koordinasi yang lebih efektif, serta pengendalian internal yang lebih kuat, sehingga *audit delay* dapat ditekan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Serly (2021) dan memberikan bukti empiris bahwa ukuran dan aktivitas dewan berpengaruh terhadap *audit delay*.

Pengaruh kompleksitas operasi terhadap audit delay

Hasil pengujian menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa kompleksitas operasi berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay* yang dibuktikan dengan melihat nilai t_{hitung} sebesar 2,824 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,001 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,006. Dengan demikian hipotesis ketiga H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Adapun koefisien regresinya memiliki nilai sebesar 0,016, yang berarti apabila variabel lain dianggap tetap maka setiap kenaikan satu satuan kompleksitas operasi akan meningkatkan *audit delay* sebesar 0,016. Artinya semakin rumit kegiatan operasional perusahaan maka semakin lama pula waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan. Dari perspektif teori agensi,

kompleksitas operasi meningkatkan asimetri informasi sehingga auditor harus melakukan prosedur lebih mendalam untuk mencegah moral hazard. Sementara teori kepatuhan menjelaskan bahwa semakin kompleks kegiatan usaha, semakin banyak regulasi yang harus dipenuhi, sehingga audit memerlukan waktu lebih lama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Isnaenia & Nurcahya (2021) serta Sari & Sujana (2021) yang sama-sama menunjukkan bahwa operasi yang rumit memperpanjang *audit delay*.

Pengaruh proporsi utang terhadap audit delay

Hasil pengujian menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa proporsi utang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* yang dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,129 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,001 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,038. Sehingga dengan demikian hipotesis keempat H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak. Adapun nilai koefisien regresinya sebesar 0,608, yang berarti apabila variabel lain dianggap tetap maka setiap kenaikan satu satuan proporsi utang akan meningkatkan *audit delay* sebesar 0,608. Semakin besar tingkat proporsi utang yang dimiliki perusahaan maka semakin lama pula waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan sehingga *audit delay* semakin panjang. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang dimana utang yang tinggi meningkatkan risiko dan konflik dengan kreditur sehingga auditor perlu melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kemudian dari sisi teori kepatuhan, banyaknya perjanjian kredit dan regulasi menuntut penilaian kepatuhan yang rinci dan memperpanjang audit. Sementara itu, teori sinyal menjelaskan bahwa leverage tinggi mendorong auditor melakukan pengujian tambahan untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan. Hasil ini konsisten dengan Astuti et al. (2022), Virginia et al. (2022), Rankine et al. (2024) bahwa proporsi utang berpengaruh terhadap *audit delay*.

Pengaruh opini audit terhadap audit delay

Hasil pengujian menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* yang dibuktikan dengan melihat nilai t_{hitung} sebesar -0,1324 yang lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,001 dengan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,191. Sehingga dengan demikian hipotesis kelima H_{a5} ditolak dan H_{05} diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa secara statistik jenis opini audit yang diterima tidak cukup kuat untuk mempengaruhi panjang-pendeknya waktu penyelesaian audit pada perusahaan BUMN yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan teori kepatuhan dan sinyal, opini audit tidak mempengaruhi durasi audit karena auditor tetap menjalankan prosedur dan standar yang sama serta wajib menyelesaikan audit

tepat waktu terlepas dari jenis opini, sementara sinyal positif dari opini lebih berperan pada tahap publikasi laporan. Temuan ini sejalan dengan Isnaenia dan Nurcahya (2021) yang menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa *audit delay* pada perusahaan BUMN di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor internal manajerial dan karakteristik operasional dibandingkan mekanisme tata kelola formal. Ukuran dewan direksi terbukti mampu mempercepat penyelesaian audit, sedangkan kompleksitas operasi dan proporsi utang justru memperpanjang *audit delay*. Dewan komisaris independen dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi manajemen BUMN dan regulator dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan melalui penguatan koordinasi internal dan pengelolaan risiko perusahaan.

Penelitian ini berkontribusi menambah bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan waktu audit pada BUMN. Temuan ini juga berkontribusi memberi arahan praktis bagi BUMN untuk menata struktur direksi yang lebih responsif, merampingkan proses operasional yang berpotensi menambah beban audit, serta mengelola utang secara lebih terkontrol agar siklus pelaporan tidak melambat. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan investor, regulator, manajemen perusahaan, dan investor agar lebih terfokus dalam menilai risiko keterlambatan audit dan kualitas tata kelola perusahaan.

Daftar pustaka

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services* (16th edition). Pearson Education, Inc.
- Astuti., Nainggolan, C. D., & Sembiring, L. D. (2022). Audit delay: Influencing factors (Case study of large trading companies on The Indonesia Stock Exchange for the period 2017 - 2021). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(6), 1540-1548.
<https://ijstm.inarah.co.id/index.php/ijstm/article/view/700>
- Dyer, J. C., & McHugh, A. J. (1975). The timeliness of the Australian annual report. *Journal of Accounting Research*, 13(2), 204-219.
<https://doi.org/10.2307/2490361>
- Hernugraheni, C., Sukesti, F., Santosa, R. E. W. A., Khasanah, L., Nugroho, W. S., Setyono, D., & Fakhrudin, I. (2023). Financial ratio, reputation of public accountant office and audit report lag. *Maksimus: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 13(1), 28-38.

<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX/article/view/11995/0>

- Himawan, M., & Darsono. (2024). Pengaruh firm size, profitabilitas, solvabilitas, leverage dan audit firm size terhadap audit report lag (studi empiris pada BUMN yang beroperasi periode 2020–2023). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1-13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/47929>
- Kristianti, I., & Setianingsih, A. (2022). Pengaruh manajemen laba dan tata kelola perusahaan terhadap audit delay. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1621-1632. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/810>
- Kurnia, L., Saifi, M., & Damayanti, C. R. (2024). Corporate governance dynamics: How audit committees and board characteristics influence firm value through audit report lag?. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 21(1), 61–86. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/jema/article/view/21790>
- Nouraldeem, R. M., Mandour, M., & Hegazy, W. (2021). Audit report lag: audit report lag: Do company characteristics and corporate governance factors matter? Empirical evidence from Lebanese commercial banks. *BAU Journal - Society, Culture and Human Behavior*, 2(2), Article 13, 1-21. <https://digitalcommons.bau.edu.lb/schbjournal/vol2/iss2/13/>
- Tanujaya, K., & Nuriah, S. (2023). Determinants that influence audit delay. *Global Financial Accounting Journal*, 7(1), 99-116. <https://journal.uib.ac.id/index.php/gfa/article/view/7626>
- Safitri, R. D., & Triani, N. N. A. (2021). Factors that influence audit delay in the trade, service, and investment sector that listed on Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 23(1), 41–50. <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/23594>
- Isnaeni, U., & Nurcahya, Y. A. (2021). Pengaruh manajemen laba, kompleksitas operasi perusahaan, solvabilitas, dan opini audit terhadap audit delay pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Indonesia untuk tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(1), 24–34. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/14080>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 76, 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Edisi revisi. PT Raja Grafindo Persada.
- Milgram, S. (1974). *Obedience to authority: An experimental view*. Harper & Row.
- Natalia, D., Syarbini Ikhsan, & Gita Desyana. (2025). Pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(5), 3529–3538. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5.5468>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375.
- Rankine, R., Anisa, A. S., Fitriana., & Santoso, R. A. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay berdasarkan literature review terindeks sinta tahun 2019-2023. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(11), 824-837. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/4319>
- Safitri, R. D., & Triani, N. N. A. (2021). Factors that influence audit delay in the trade, service, and investment sector that listed on Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 23(1), 41–50. <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/23594>
- Sari, N. K. M. A., & Sujana, E. (2021). Pengaruh reputasi KAP, opini audit, profitabilitas, dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay (Studi Empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015–2017). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(2), 557-568. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/31249>
- Serly. (2021). Tata kelola perusahaan dan audit report lag pada perusahaan financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 631-643. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/498>
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://www.jstor.org/stable/1882010>
- Sulistyo, B. (2010). *Metode penelitian*. Penaku.
- Syachrudin, D., & Nurlis. (2018). Influence of company size, audit

opinion, profitability, solvency, and size of public accountant offices to delay audit on property sector manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(10), 106- 111.

<https://www.ijstr.org/research-paper-publishing.php?month=oct2018>

Ulfa, R., & Primasari, N. H. (2017). Pengaruh laba akuntansi, opini audit, solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap audit delay (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 161-180.

<https://journal.budiluhur.ac.id/akeu/article/view/416>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Virginia, A. M., Djajadikerta, H., Setiawan, A., & Wirawan, S. (2024). Pengaruh proporsi dewan komisaris independen, likuiditas, dan solvabilitas terhadap audit delay perusahaan pada industri property dan real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021. *UBS Business School Journal of Economics & Business*, 12(6), 58-71.

<https://jurnal.ubs-usg.ac.id/index.php/joeb/article/view/847>